

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **3.1 Profil Sejarah Instansi**

**Gambar 3.1 Logo POLRI**



Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di

front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor

digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan

perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

### **Visi**

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalannya sinergi polisional yang proaktif.

### **Misi**

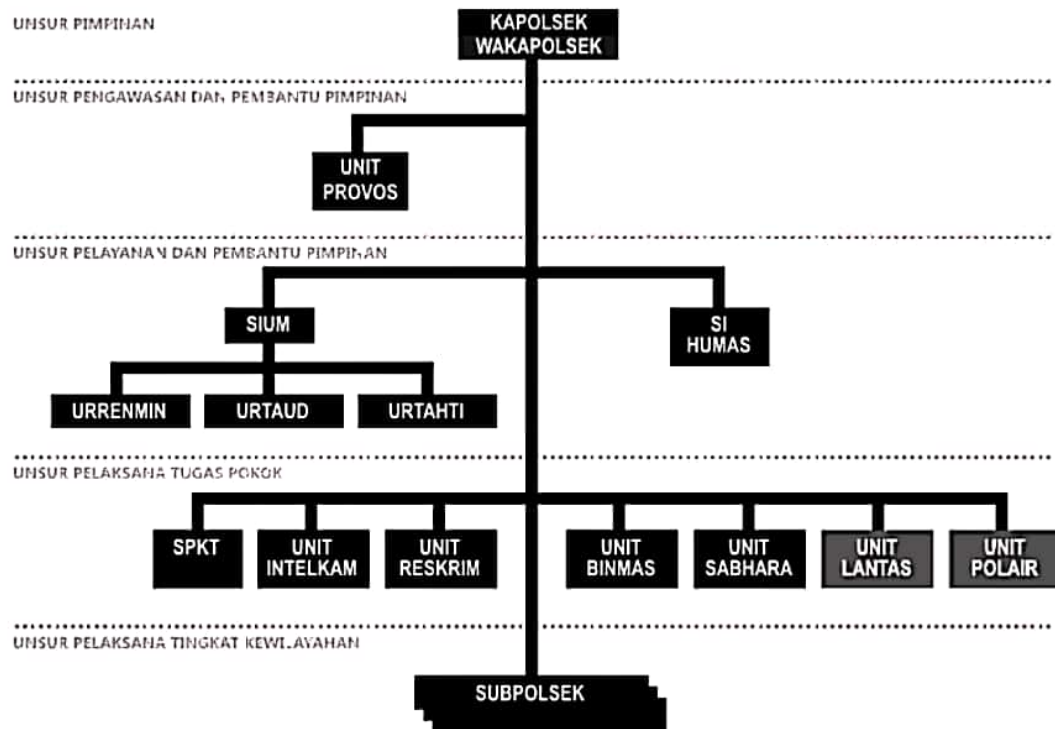
1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

Dalam laporan ini penulis melakukan kegiatan magang di Polsek

Metro Penjaringan. Magang yang dilakukan dalam membantu kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh Polsek Metro Penjaringan.

### 3.2 Struktur Organisasi

Gambar 3.2 Struktur Organisasi



Tugas Kapolsek bertugas memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan satuan Organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan kewilayah dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

#### Fungsi

- Pengawasan, pengendalian, pemimpin dan pembina satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayah dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.
- Pemberian saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

## **Kegiatan**

- Memberikan arahan dan kebijakan strategis Polsek di bidang Pembinaan maupun operasional di lingkungan unsur Pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsure pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
- Memberikan perintah/tugas kepada unsur pengawas dan pembantu pelaksana pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
- Menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Untuk prosesi Vaksinasi di ketua kan oleh IPDA ANDREAS JONATHAN, SH yang bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan vaksinasi. BRIPKA AHMAD RIDWAN, SE yang bertugas sebagai kepala kordinir lapangan dan sekaligus kepala IT dalam pelaksanaan vaksinasi. Sholehah, AMD yang betugas sebagai kepala kordinir untuk petugas NAKES dan NON NAKES. Untuk anggota Nakes: Togas Sihombing dan Andre Fernaldy sebagai Dokter, Putri Nabila dan Intan sebagai petugas tensi, dan Yuni Wulan Sari dan Waode Salsabila sebagai petugas vaksinasi. Untuk NON NAKES: Naufal Daffa Alfajri dan Muhammad Farhan sebagai petugas penginputan data yang telah tervaksin.

### **3.3 Kegiatan Vaksin Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara**

Vaksinasi atau Imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Hingga sampai saat ini virus corona

belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya.

Demi mendukung program pemerintah Polsek Metro Penjaringan menjalankan kediiatan vaksin selama 2 bulan penuh kegiatan vaksinasi demi mengurangi penularan covid 19. Kegiatan vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan Polsek Metro Penjaringan Utara mendapat antusiasme dari masyarakat. Kegiatan berlangsung di Batavia PIK, Tanggul Jalasena Barat, Golf Island, Jakarta Utara, sejak Sabtu pekan lalu hingga Kamis nanti.

Kegiatan vaksinasi yang menggunakan sistem software vaccine contactless yaitu piranti lunak PeduliWarga didukung penuh ASG Agung Sedayu Grup dan Tzu Chi. Acara ini dibantu para relawan yang tergabung dalam Grup Peduli Pelajar Tiongkok. "Kami membantu pendaftaran secara online bagi para pengunjung dan calon peserta vaksinasi," ujar Paris, salah satu mahasiswi University of Nottingham China, Ningbo, Senin (28/3).

Paris mengatakan keterlibatannya sebagai relawan untuk mengisi waktu karena perkuliahan masih dilakukan secara daring. Ia sudah dua tahun belum bisa kembali ke Tiongkok karena pandemi Covid-19.

Menurutnya, perlu bantuan Pemerintah Indonesia untuk menyetujui Pemerintah Tiongkok agar segera membuka masuknya para pelajar Indonesia. "Selama 2 tahun ini, kita berasa belajar online tidak semaksimal dan seefektif offline," katanya.

Ada beberapa relawan yang sudah mengikuti vaksin pertama dan kedua dan vaksinasi booster, tetapi belum tercatat dalam aplikasi PeduliLindungi. Kegiatan vaksinasi ini meminimalkan kontak (*contactless*) karena proses sejak pendaftaran dilakukan secara online. Peserta tinggal datang mengikuti tensi darah dan penyuntikan vaksin. "Piranti lunak ini dinilai sangat baik, pertama kali di Indonesia dan mungkin di dunia kata Kapolda," ujar Kapolsek Penjaringan Utara AKBP Febri Isman Jaya, saat pertama kali sistem dicoba di Kantor RW 06, Kelurahan Kamal Muara, BGM PIK, Jakarta Utara.

Dalam kegiatan vaksinasi yang melibatkan relawan Peduli Pelajar Tiongkok ini disiapkan sebanyak 1000 dosis setiap hari. Untuk vaksin pertama dan kedua anak menggunakan Sinovac, kemudian vaksin pertama dan kedua bagi orang dewasa menggunakan AstraZaneca. Vaksin untuk booster yaitu AstraZaneca.

Vaksinasi dibuka untuk masyarakat umum, setiap hari hingga akhir Maret 2022, mulai pukul 18.00 hingga 23.00 WIB. Peserta di bawah 17 tahun wajib membawa kartu keluarga, sedangkan di atas 18 cukup dengan KTP. Pendaftaran online melalui [www.PeduliWarga.com](http://www.PeduliWarga.com)